

Tak Ingin Ada Korban Sipil, Kapolda Papua Minta Warga Jauhi KKB

Timika (IM) - "Iya kami masih terus melakukan pengejaran dan melakukan penutupan beberapa akses lintasan mereka, intinya kami Polda Papua terus melakukan pengejaran dengan pola Tegas Terukur," kata Mathius ditemui di Hotel Horison Hasanuddin, Timika, Minggu (2/5).

Mathius menyebut, Polri telah mengidentifikasi enam kelompok KKB yang aktif di Intan Jaya, Ilangga, dan Nduga. Dia berharap, saat terjadi kontak tembak dengan KKB, tidak ada korban dari warga sipil.

Karena itu, pihaknya sedang mendekati masyarakat untuk menjauhi KKB. Sehingga, masyarakat tetap aman dan tidak menjadi korban kontak tembak.

"Selain pengejaran, kami juga lakukan pendekatan, agar masyarakat bisa memisahkan diri dengan KKB, sehingga tidak ada korban saat ada penindakan," tambah Kapolda.

Sementara itu untuk memback-up personel Polres dan Polsek di wilayah rawan, pihaknya telah mengirim personel tambahan untuk penegakan hukum terhadap KKB.

Irijen Mathius D Fakhri sebelumnya melakukan pertemuan tertutup dengan para bupati pegunungan di Timika, Papua. Apa yang dibahas?

Kapolda Papua tiba di Timika dari Jakarta pukul 09.15 WIT dan langsung menuju Hotel Horison untuk

langsung melakukan pertemuan bersama para bupati.

Pertemuan tertutup itu diyakini membahas permasalahan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, yang saat ini telah diubah statusnya menjadi kelompok teroris.

Pantauan di lapangan, belum semua bupati mengikuti pertemuan. Namun salah satu yang hadir ialah Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni.

Natalis Tabuni saat ditemui se usai pertemuan dengan Kapolda Papua tidak menjelaskan secara rinci pembahasan dalam pertemuan tersebut. Namun dia mengatakan ada arahan untuk melakukan pendekatan kekeluargaan, pendekatan persuasif, kepada kelompok-kelompok yang selalu membuat kacau di Intan Jaya, terutama kelompok Sabinus Waker.

"Intinya ada arahan Bapak Kapolda untuk melakukan pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan kepada kelompok-kelompok di Intan Jaya, khususnya kelompok Sabinus Waker," kata Natalis Tabuni saat ditemui di lobi Hotel Horison Hasanuddin, Sabtu (1/5). Ditanya soal situasi di Intan Jaya, Natalis Tabuni mengatakan situasi di wilayah yang dipimpinnya saat ini sudah kondusif. Aktivitas warga dan layanan pemerintahan berjalan normal.

"Puji Tuhan, sudah satu bulan lebih ini situasi aman, kondusif," katanya. ● lus

Polda Metro Jaya dan TNI Buat Posko Cegah Kerumunan di Pasar Tanah Abang

TANAH ABANG (IM) - Polda Metro Jaya bersama TNI mendirikan posko pengamanan untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan masyarakat di Pusat Grosir Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Menyangkut masalah yang ramai di Pasar anah Abang, pertama kita dari pihak kepolisian akan menindaklanjuti, kita akan melakukan pendisiplinan masyarakat untuk taat aturan 5M jangan sampai terjadi kerumunan lagi di sana," ujar Kabid Humas Pold Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (1/5).

Yusri menyebut aparat keamanan menyikapi serius terjadinya kerumunan di lokasi tersebut. Untuk itu, pihaknya pun akan mendirikan posko pengamanan di lokasi.

Posko pengamanan itu mulai didirikan pada Minggu (2/5). Lewat posko pengamanan tersebut pengawasan protokol kesehatan masyarakat di lokasi akan semakin ketat.

"Mulai (Minggu) kita akan dirikan pos pengamanan di sana dari polisi, TNI dan pemerintah daerah di sana. Di pos itu kita siapkan masker, kita ketatkan patroli bersama di situ untuk menghindari kerumunan," kata Yusri.

Langkah terakhir yang diambil petugas untuk mencegah terjadinya kerumunan di lokasi adalah dengan mem-

prioritaskan masyarakat pembeli dengan kuota grosiran di lokasi tersebut.

"Kita akan mengatur skala prioritas belanja untuk Pasar Grosir Tanah Abang bagi pengunjung yang beli grosiran yang biasanya pembelanja antarkota. Lalu yang pembelanja untuk pribadi kita urai di pasar khusus yang bukan jual grosiran," katanya.

Yusri meminta masyarakat yang berbelanja di Pasar Tanah Abang tetap menaati protokol kesehatan. Dia menyebut perputaran roda ekonomi di lokasi dan penerapan protokol kesehatan harus tetap berjalan seiringan.

"Kita tetap tekankan, kita imbau ke masyarakat yang belanja di sana untuk taat aturan protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, dan tidak berkerumun harus selalu diterapkan," imbau Yusri.

Meski sebagian masyarakat Indonesia telah divaksin, Yusri menyebut penerapan protokol kesehatan harus terus dilakukan.

Dia mengingatkan kondisi pandemi virus corona di Indonesia belum berakhir saat ini hingga disiplin protokol kesehatan harus tetap dilakukan masyarakat.

"Pandemi COVID-19 belum berakhir, vaksin bukan jaminan mutlak kita tidak terulang. Silakan beraktivitas, tapi tetap disiplin prokes, karena disiplin juga adalah vaksin," ujarnya. ● lus

Coba Kelabui Petugas, Pemudik Asal Jakarta Tumpang Truk ke Kuningan

KUNINGAN (IM) - Banyak orang mencoba berbagai cara untuk mengelabui petugas agar bisa mudik ke kampung halaman. Seperti yang dilakukan enam orang pemudik asal Jakarta yang akan kembali ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini.

Mereka bersembunyi di belakang truk yang ditutupi terpal, dengan harapan aksi mereka tidak terlihat petugas.

Sayangnya usaha mereka yang nekat mudik dengan cara tak biasa itu gagal lantaran truk yang ditumpanginya mereka terjaring razia penyekatan yang dilakukan petugas gabungan di pos *check point* Tugu Ikan Sampora, Kabupaten Kuningan pada Minggu (2/5) pagi.

Ipda Sunardi Padal *cek point* Tugu Ikan Sampora mengatakan awalnya petugas curiga dengan truk bernomor polisi E 8965 YW berwarna kuning itu. Benar saja, saat diperiksa truk itu rupanya mengangkut pemudik asal Jakarta.

"Iya ada kendaraan truk yang mengangkut enam orang pemudik. Pemudik ini mengelabui petugas dengan sembunyi di belakang truk yang ditutup terpal, biar dikiranya bawa barang," kata Sunardi.

Setelah dilakukan pemeriksaan, pemudik yang menumpang di truk tersebut tidak bisa menunjukkan surat hasil antigen maupun prokes

Covid-19 lainnya. Petugas pun akhirnya terpaksa memutar balikkan truk untuk kembali ke Jakarta. "Pemudik ini mau pulang ke Cibingbin, pas diperiksa tidak bisa menunjukkan surat hasil antigen. Jadi kami putar balik kembali ke Jakarta," ucap Sunardi.

"Saat diminta putar balik mereka (pemudik) ngomel-ngomel minta diizinkan masuk dan melanjutkan perjalanan. Tapi tetap kita putar balikkan," lanjutnya.

Selain itu dalam penyekatan kali ini petugas juga mendapati razia penyekatan yang menggunakan bajai. Tercatat ada empat unit bajai yang dihentikan dan diperiksa petugas di pos penyekatan Kuningan-Girebon ini.

Namun untuk pemudik yang menggunakan bajai itu, petugas tidak diminta putar balik karena faktor kemanusiaan. "Iya ada juga (bajai) empat unit yang diperiksa. Tapi buat yang bajai ini dengan berat hati dan rasa kemanusiaan kita loloskan karena mereka sudah kelelahan, takut ada apa-apa di jalan kalau diputar balik, juga ada anak kecil di dalamnya," jelas Sunardi.

Pada H-4 larangan mudik ini kata Sunardi, kendaraan berpelat nomor luar daerah yang melintas di pos *check point* Tugu Ikan Sampora mulai mengalami peningkatan. Pagi ini saja petugas telah memeriksa puluhan kendaraan. ● lus

FOTO/ANT



KECELAKAAN DI PERLINTASAN SEBIDANG KERETA API

Warga melihat kondisi mobil yang tertabrak Kereta Api (KA) Sibinuang jurusan Naras - Padang di Lubuk Buaya, Padang, Sumatera Barat, Minggu (2/5). Akibat kejadian tersebut pengemudi mobil mengalami luka-luka serta terganggunya jadwal keberangkatan kereta, sementara itu PT KAI Divre II Sumbar mencatat sedikitnya 15 kasus kecelakaan terjadi pada awal 2021 di perlintasan sebidang rel kereta api.

Penangkapan Munarman Pintu Masuk Polri Bersihkan Anasir Ekstremisme

Anggota tim kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar menyatakan akan segera mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum dan upaya praperadilan untuk kliennya.

JAKARTA (IM) - Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menyebut, penangkapan mantan petinggi Front Pembela Islam (FPI), Munarman menjadi pintu masuk kepolisian membersihkan pergerakan kelompok berpaham ekstremisme di Tanah Air.

"Sekarang ditinggalkan dengan pasal terorisme terkait baat ISIS. Ini hanya soal pintu

masuk saja untuk bagaimana menangkap Munarman ini," ujar Bambang dalam diskusi virtual di *Medcom.id*, Minggu (2/5).

Menurut Bambang, penangkapan Munarman mempunyai konteks besar bagi aparat keamanan, yakni menyingkirkan orang atau pun kelompok berpaham ekstremisme. "Semuanya mengarah ke sana, bagaimana FPI ini benar-benar harus segera dibersihkan

dari anasir-anasir ekstremisme," kata Bambang.

Bambang menyebut seseorang berpaham terorisme maupun simpatisan ekstremisme sebetulnya banyak sekali. Begitu juga di tubuh FPI yang diduga banyak diisi orang berpaham ekstremisme atau mengarah pada terorisme.

Karena itu, penangkapan Munarman menjadi gebrakan besar yang juga memberikan efek jera kepada kelompok ekstremisme di Indonesia yang sebagian memang berada di FPI.

"Jangan sampai yang semula hanya simpatisan kepada FPI pada gerakan sosial yang dilakukan FPI kemudian semakin besar kebenciannya kepada pemerintah, kepada kepolisian,

kemudian mengarah pada ekstremisme, ini yang dicoba untuk dihindari dengan penangkapan Munarman ini," ujarnya.

Diteroriskan?

Anggota tim kuasa hukum Munarman, Sugito Atmo sebelumnya mengatakan, pihaknya sangat prihatin dengan penangkapan Munarman. Sugito menduga, penangkapan terhadap kliennya itu hanya dibuat-buat karena sikap politik dan pernyataan Munarman selama ini kerap menimbulkan pro-kontra.

"Saya khawatir ini bukan proses hukum, tapi dari sikap politik Munarman selama ini yang melatarbelakangi sehingga dia 'diteroriskan,'" kata Sugito saat dihubungi, Jumat (30/4).

Munarman diketahui ditangkap sebagai tersangka tindak pidana terorisme pada Selasa (27/4). Dia ditangkap terkait kegiatan baat terhadap Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS/ISIS) di Jakarta, Makassar, dan Medan.

Pada, menurut Sugito, kegiatan baat yang dikaitkan dengan Munarman itu sudah terjadi cukup lama. Apalagi,

kata dia, Munarman dan petinggi FPI lainnya pun sudah secara terbuka menolak ISIS.

"Setelah tahu perjuangannya banyak bertentangan dengan Islam, akhirnya mencahut dukungan terhadap ISIS. Habib Rizieq dan lain-lain secara berurutan menolak keberadaan ISIS," ujarnya. "Tapi ya sudahlah, pasti akan terungkap fakta yang sebenarnya apa penyebab Munarman ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dengan cara-cara seperti teroris pada umumnya," kata Sugito.

Ia pun mengatakan, sampai saat ini baik tim kuasa hukum maupun keluarga belum ada yang bisa bertemu dengan Munarman di Pold Metro Jaya.

Dihubungi terpisah, anggota tim kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar menyatakan akan segera mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum dan upaya praperadilan. Menurut tim kuasa hukum, penangkapan terhadap Munarman telah menyalahi prinsip hukum dan hak asasi manusia.

"Nanti kami akan kirim surat permohonan perlindungan hukum dan upaya praperadilan," ujar Aziz. ● lus

Polri Kesulitan Identifikasi Jumlah KKB yang Tewas saat Baku Tembak

PAPUA (IM) - Asisten Operasi Kapolri, Inspektur Jenderal Imam Sugianto, mengatakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua selalu mengangkut jenazah rekannya yang tewas dalam baku tembak. Akibatnya, aparat kesulitan melakukan proses pendataan.

"Begitu mereka sudah ketembak, tidak bisa kita identifikasi musuh, jasadnya langsung diangkat KKB. Itu kesulitan yang ada di lapangan," tutur Imam dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (30/4).

Iman melanjutkan, pihaknya telah memperkirakan jumlah korban dari pihak KKB Papua telah mencapai lima orang. Mereka terkena terluka saat terlibat baku tembak.

"Kita sudah dapat kira-kira melumpuhkan mereka itu ada 5 orang informasi terakhir. Kalau gak 5, mungkin ada lagi masih diinvetarisir," jelasnya.

Iman menyatakan, pihaknya tidak akan meningkatkan pola penyerangan terhadap KKB Papua. Aparat lebih memfokuskan untuk menjaga titik lokasi yang akan dikuasai oleh KKB.

"Kita kan memang, selama ini cenderung lebih bertahan kan. Kalau ada kejadian, baru kita mengejar target operasi (IO) yang disusun. TO yang akan dikerajai itu disesuaikan dengan perencanaan awal," tandasnya.

Denjaka Ikut Tumpas KKB?

Korps Marinir membantah pasukan elite TNI Angkatan Laut (AL) yakni Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) dikerahkan ke Papua untuk menumpas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan KKB sebagai organisasi teroris oleh pemerintah.

Kadis Penerangan Marinir Angkatan Laut, Letkol Gugun Saiful Racman mengatakan, tidak ada yang mengetahui pergerakan Denjaka. Kegiatan denjaka juga tidak dipublikasikan.

"Seluruh kegiatan Denjaka tidak pernah diberitakan. Kegiatan di sana tidak ada," katanya saat dihubungi MPI.

Pernyataan tersebut menepis isu yang beredar di media sosial (medsos) bahwa Denjaka dikerahkan ke Papua untuk memberangus KKB.

"Pasukan elit angkatan laut DENJAKA sudah sampai di tanah Papua. Kekuatan 1 Denjaka = 12 orang. Mempunyai kekuatan misterius yang bikin angkatan laut Amerika gemetar," cuit akun @H41mun_D1n61n.

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menetapkan KKB di Papua sebagai daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT).

"Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan massif dikategorikan sebagai teroris," ujar Mahfud dalam jumpa persnya, Kamis 29 April 2021.

Pemerintah meminta TNI dan Polri untuk menindak KKB di Papua yang semakin meresahkan. Hal itu mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme.

"Pemerintah sudah meminta kepada Polri TNI, BIN dan aparat terkait segera melakukan tindakan secara cepat, tegas dan terukur," ujarnya. ● lus



PENGETANG PERGERAKAN WARGA DI PELABUHAN KETAPANG Polisi memeriksa bus dari Pulau Bali yang membawa sepeda motor di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu (2/5). Pemeriksaan itu dilakukan sebagai pengetatan pergerakan warga jelang masa larangan mudik pada 6-17 Mei 2021 sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

IDN/ANTARA